PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 DAN PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto)

MOKHAMAD IRAWAN

120404020076

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Kanjuruhan Malang

Drs. Anwar Made, M.SI.,AK.,CA

Doni Wirshandono Y, SE.,M.AK.,CA

E-mail : [ir\_irawan@yahoo.co.id](mailto:ir_irawan@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 dilihat dari Basis Akuntansi, Karakteristik Kualitatif, Prinsip-prinsip dalam penyajian LRA, Pengakuan dalam penyajian LRA, Pengukuran dalam penyajian LRA, dan dilihat penyajian LRA secara keseluruhan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa kuesioner. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilihat dari Basis Akuntansi, Karakteristik Kualitatif, Prinsip-prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengakuan dalam Penyajian LRA, Pengukuran dalam Penyajian LRA sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan secara keseluruhan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013.

Kata Kunci : ***Penerapan, Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP NO.02, dan Permendagri 64 Tahun 2013.***

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

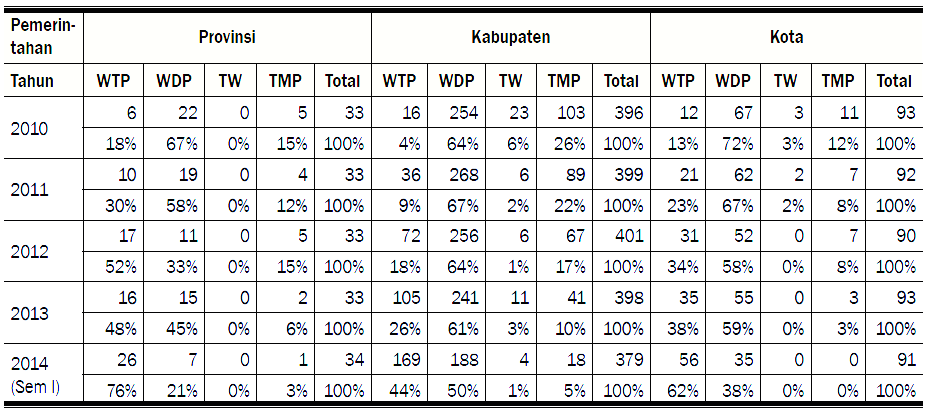
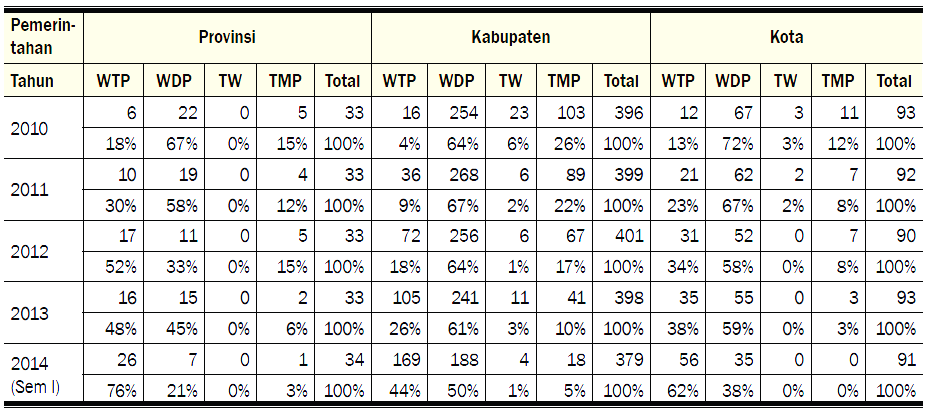
Pola penyajian laporan keuangan di setiap pemerintah daerah adalah sama sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah suatu standar, pedoman pedoman, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Sehingga, dengan adanya Standar Akuntansi ini maka setiap laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan standar ini.

Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan yang dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga kredibilitas laporan keuangan dapat meningkat serta dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan *Good Governance* dapat tercapai. Oleh sebab itu dibuatlah peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan, yakni peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di dalamnya terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Pernyataan standar ini mengatur pelaporan realisasi anggaran untuk tujuan umum yaitu memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya peraturan tersebut pada intinya pemerintah menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, setelah tahun berlakunya paket undang-undang tersebut, masih banyak Pemerintah yang mendapatkan opini WDP. Seperti yang dapat dilihat pada tabel data hasil pemeriksaan BPK RI berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015.

Tabel 1

Opini LKPD Tahun 2010-2014 Berdasarkan Tingkat Pemerintah

*Sumber : BPK RI (IHPS I, 2015)*

Dari data diatas tersebut masih banyak pemerintah daerah yang belum mendapatkat opini Wajar Tanpa Penyecualian (WTP) dari BPK RI terutama di tingkat Kabupaten dan Kota. Fenomena-fenomena tersebut menimbulkan dugaan adanya kekurang sesuaian penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pemerintah kabupaten/kota dengan standar yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02.

Dalam rangka mengetahui kesesuaian penyusunan laporan realisasi anggaran dengan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, dan supaya Laporan Realisasi Anggaran tidak menimbulkan dugaan adanya kekurang sesuaian penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di Kabupaten Mojokerto dengan standar yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis membuat karya ilmiah dengan menarik judul : **Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto).**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas penelitih merumuskan masalah yang menjadi dasar penyusunan skripsi, adalah :

Apakah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan sudah disusun sesuai dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendragri Nomor 64 Tahun 2013 ? (dilihat dari prinsip-prinsip akuntansi, basis akuntansinya, karaktristik kualitatif, pengakuan, pengukuran dan dalam penyajian LRA)

**B. METODE PENELITIAN**

**1. Rancangan Penelitian**

Rancangan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis.

Simanihuruk (2013:46), menyatakan bahwa: Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

**2. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang dijadikan objek penelitian, maka penelitian ini hanya menganalisis mengenai Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil objek penelitian di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

**3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang menangani keuangan pada 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Mojokerto.

Dalam penelitian ini kriteria pengambilan sampel adalah pegawai yang memiliki kompetensi dalam pelaporan keuangan, yaitu: Kepala Bidang Akuntansi

dan Pelaporan serta Bendahara pada setiap dinas Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

**4. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini adapun data yang diperlukan adalah data primer dan

data sekunder.

Data primer pada penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang ditujukan pada pegawai yang memegang jabatan dalam bidang keuangan pada setiap Dinas Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Data sekunder ini merupakan data yang berisi informasi-informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran 2015.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kuesioner.

1. Pertanyaan yang akan diberikan adalah menyangkut fakta dan pendapat responden, dalam hal ini adalah orang-orang atau pegawai yang memegang jabatan dalam bidang keuangan pada setiap SKPD di Kabupaten Mojokerto untuk mendapat informasi yang sesuai dengan pembahasan penelitian yaitu untuk mengetahui Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013. (dilihat dari prinsip-prinsip akuntansi, basis akuntansinya, karaktristik kualitatif, pengakuan, pengukuran dan dalam penyajian LRA).

**6. Skala Pengukuran**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan angket langsung dan tertutup dengan bentuk *skala likert* yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Berikut adalah scoring jawaban responden :

Tabel.2

Alternatif Jawaban Responden

|  |  |
| --- | --- |
| Jawaban | Nilai |
| Sangat Sesuai (SS) | 5 |
| Sesuai (S) | 4 |
| Cukup Sesuai (CS) | 3 |
| Kurang Sesuai (KS) | 2 |
| Tidak Sesuai (TS) | 1 |

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus untuk menghitung dengn metode nilai tertinggi-nilai terendah.

Menurut Sudjana (Simanihuruk, 2013:51), analisis interval yaitu metode nilai tertinggi-nilai terendah dengan rumus sebagai berikut :

****

****

Keterangan :

P = Panjang Kelas

Rentang = Data tertinggi dikurang dengan data terendah

Banyak kelas = Jumlah jawaban responden

**7. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Metode analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai keadaan yang diteliti.

2. Metode Analisis deduktif yaitu analisis dilakukan dengan cara membandingkan teori-teori dengan praktek dalam perusahaan. Kemudian membuat kesimpulan dan mengemukakan saran untuk mengatasi masalah yang sama di Pemerintah Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang.

**C. ANALISIS DATA**

**1. Deskripsi Data**

Data penelitian dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada Pejabat Bagian Keuangan dan staf pegawai keuangan yang berada di 5 Badan, 8 Dinas, dan 1 Kantor daerah Kabupaten Mojokerto. Penyebaran Kuesioner dilaksanakan pada tanggal 25 mei 2016 sampai dengan 3 juni 2016.

Kuesioner yang dapat disebarkan peneliti sebanyak 45 lembar dan semua kuesioner yang disebar tersebut kembali. Tetapi dari 45 kuesioner tersebut ada 5 kuesioner yang tidak bisa diolah lebih lanjut. Sehingga total keseluruhan kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut sebanyak 40 lembar.

**2. Analisis Hasil Penelitian**

Cara penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan skala likert adalah sebagai berikut :

Responden = 40 orang

Nilai Tertinggi = 5

Nilai Terendah = 1

Item Pertanyaan = 4

Maka, Skor tertinggi = 5 x 40 x 4 = 800

Skor terendah = 1 x 40 x 4 = 160

Maka dapat digambarkan sebagai berikut:

TS KS CS S SS

160 288 416 544 672 800

638

Gambar 4.1

Jarak Interval

****

I = 800-160

5

= 128

Keterangan :

SS = Sangat Sesuai = 5

S = Sesuai = 4

CS = Cukup Sesuai = 3

KS = Kurang Sesuai = 2

TS = Tidak Sesuai = 1

**D. PEMBAHASAN**

**Penerapan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto**

**1. Basis Akuntansi dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran**

a. Penerapan basis akuntansi untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam LRA. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 145.

b. Penerapan basis Akuntansi dalam pendapatan dan penerima pembiayaan diakui pada saat diterima di RKUN/D serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUN/D. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 145.

c. Sisa pembiayaan anggaran pada setiap periode dalam selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 148.

Maka dari hasil yang diperoleh, yaitu :

145 + 145 + 148 = 438

Responden = 40 orang

Nilai Tertinggi = 5

Nilai Terendah = 1

Item Pertanyaan = 3

Maka, Skor tertinggi = 5 x 40 x 3 = 600

Skor terendah = 1 x 40 x 3 = 120

Dapat digambarkan sebagai berikut:

TS KS CS S SS

120 216 312 408 504 600

438

Gambar 5.1

Jarak Interval Basis Akuntansi dalam LRA

****

I = 600-120 = 96

5

Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Penerapan Basis Akuntansi dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran adalah 438.

Dari hasil tersebut, jumlah skor berada pada interval 408 dan 504 bahwa penerapan basis akuntansi yang digunakan Pemerintah Kota Mojokerto memadai karena basis yang digunakan basis kas. Hal ini berarti Penerapan Basis Akuntansi yang digunakan Pemerintah Kota Mojokerto telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

**2. Karakteristik Kualitatif Penyajian Laporan Realisasi Anggaran**

a. Penerapan LRA dalam menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 147.

b. Penyajian LRA dalam memprediksi masa depan yang berdasarkan hasil prediksi di masa lalu dan kejadian masa kini. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 150.

c. Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan tepat waktu. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 170.

d. LRA disajikan dengan selengkap mungkin. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 168.

e. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran disajikan secara jujur. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 164.

f. Laporan Realisasi Anggaran dapat diuji oleh pihak yang berbeda-beda dan hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbedah jauh. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 156.

g. LRA diarahkan dalam kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 168.

h. Dapat dibandingkan yang tertera dalam LRA yang dilakukan secara internal dan eksternal dalam periode sebelumnya. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 160.

i. Penyusunan LRA yang disajikan dapat mempermudah pengguna dalam mempelajari LRA. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 173.

Maka dari hasil yang diperoleh, yaitu :

**147+ 150 + 170 + 168 + 156 + 168 + 173 = 1456**

Responden = 40 orang

Nilai Tertinggi = 5

Nilai Terendah = 1

Item Pertanyaan = 9

Maka, Skor tertinggi = 5 x 40 x 9 = 1800

Skor terendah = 1 x 40 x 9 = 360

Dengan demikian digambarkan sebagai berikut :

TS KS CS S SS

360 648 936 1224 1512 1800

1456

Gambar 5.2

Jarak Interval Karaktristik Kualitatif LRA

****

I = 1800-360 = 288

5

Dari hasil kuesioner skor yang didapatkan dalam Karakteristik Kualitatif Penyajian Laporan Realisasi Anggaran adalah 1456. Dari hasil tersebut, jumlah skor berada pada interval 1224 dan 1512 bahwa Karakteristik Kualitatif Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto cukup memadai karena informasi yang digunakan sudah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal ini berarti Karakteristik Kualitatif Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013.

**3. Prinsip-Prinsip Penyajian Laporan Realisasi Anggaran**

a. Penyajian LRA yang disusun dalam prinsip basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 160.

b. Penyajian LRA dalam memprediksi masa depan yang berdasarkan hasil prediksi di masa lalu dan kejadian masa kini. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 140.

c. Penyusunan LRA dilakukan secara transparan dalam mempermudah masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang LRA. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 150.

Maka dari hasil yang diperoleh, yaitu :

**160 + 140 + 150 = 450**

Responden = 40 orang

Nilai Tertinggi = 5

Nilai Terendah =1

Item Pertanyaan = 3

Maka, Skor tertinggi = 5 x 40 x 3 = 600

Skor terendah = 1 x 40 x 3 = 120

Dapat digambarkan sebagai berikut:

TS KS CS S SS

120 216 312 408 504 600

450

Gambar 5.3

Jarak Interval Prinsip-prinsip Penyajian LRA

****

I = 600-120 = 96

5

Dari hasil kuesioner skor yang didapatkan dalam Prinsip-Prinsip Penyajian Laporan Realisasi Anggaran adalah 450.

Dari hasil tersebut, jumlah skor berada pada interval 408 dan 504 bahwa Prinsip-Prinsip Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto cukup memadai karena sudah menggunakan basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Hal ini berarti Prisip-Prisip Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013.

**4. Pengakuan dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran**

a. Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 139.

b. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 141.

c. Pendapatan diakui pada saat terjadinya kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 149.

d. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 142.

e. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 159.

Maka dari hasil yang diperoleh, yaitu :

**139 + 141 + 149 + 142 + 159 = 730**

Responden = 40 orang

Nilai Tertinggi = 5

Nilai Terendah = 1

Item Pertanyaan = 5

Maka, Skor tertinggi = 5 x 40 x 5 = 1000

Skor terendah = 1 x 40 x 5 = 200

Dapat digambarkan sebagai berikut:

TS KS CS S SS

200 360 520 680 840 1000

730

Gambar 5.4

Jarak Interval Pengakuan Penyajian LRA

****

I = 1000-200 = 160

5

Dari hasil kuesioner skor yang didapatkan dalam Pengakuan dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran adalah 730.

Dari hasil tersebut, jumlah skor berada pada interval 680 dan 840 bahwa Pengakuan dalam Penyajian LRA yang digunakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto cukup memadai karena pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan diakui pada saat kas diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Hal ini berarti Pengakuan dalam Penyajian LRA yang digunakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendari 64 Tahun 2013.

**5. Pengukuran dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran**

a. Pengukuran LRA dalam menetapkan nilai mata uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam menggunakan nilai perolehan historis. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 151.

b. Pengukuran transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 138.

c. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajarnya. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 152.

Maka dari hasil yang diperoleh, yaitu :

**151 + 138 + 152 = 441**

Responden = 40 orang

Nilai Tertinggi = 5

Nilai Terendah = 1

Item Pertanyaan = 3

Maka, Skor tertinggi = 5 x 40 x 3 = 600

Skor terendah = 1 x 40 x 3 = 120

Dapat digambarkan sebagai berikut:

TS KS CS S SS

120 216 312 408 504 600

441

Gambar 5.5

Jarak Interval Pengukuran Penyajian LRA

****

I = 600-120 = 96

5

Dari hasil kuesioner skor yang didapatkan dalam Pengukuaran dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran adalah 441.

Dari hasil tersebut, jumlah skor berada pada interval 408 dan 504 bahwa Pengukuran dalam LRA yang digunakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto cukup memadai karena pengukuran pos-pos LRA menggunakan mata uang rupah. Hal ini berarti Pengukuran dalam LRA yang digunakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013.

**6. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran**

a. Laporan Realisai Anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelolah pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 165.

b. Laporan Realisai Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja,transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untukpenyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran menyandingkan realisasi anggaran pendapatan LRA, bekanja, transfer, surplus/defisit-LRA pembiayaan dan anggarannya. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 154.

c. laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos yaitu unsur pendapatan, belanja,transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan,pengeluaran pembiayaan, Pembiayaan Neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran(silpa/sikpa). Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 162.

d. Pos, judul dan sub jumlah lainnya disajikan dalam laporan realisasi anggaran apabila diwajibkan oleh pernyataan SAP, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan laporan realisasi anggaran secara wajar. Hasil Perhitungan jawaban dari 40 responden diperoleh nilai 157.

Maka dari hasil yang diperoleh, yaitu :

**165 + 154 + 162 + 157 = 638**

Responden = 40 orang

Nilai Tertinggi = 5

Nilai Terendah = 1

Item Pertanyaan = 4

Maka, Skor tertinggi = 5 x 40 x 4 = 800

Skor terendah = 1 x 40 x 4 = 160

Dapat digambarkan sebagai berikut:

TS KS CS S SS

160 288 416 544 672 800

638

Gambar 5.6

Jarak Interval Penyajian LRA

****

I = 800-160 = 128

5

Dari hasil kuesioner skor yang didapatkan dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran adalah 638. Dari hasil tersebut, jumlah skor berada pada interval 544 dan 672 bahwa cara penyajian LRA yang digunakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto cukup memadai karena Laporan Realisai Anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelolah pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Laporan Realisai Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja,transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untukpenyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran menyandingkan realisasi anggaran pendapatan LRA, bekanja, transfer, surplus/defisit-LRA pembiayaan dan anggarannya.. Hal ini berarti Pengukuran dalam LRA yang digunakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013.

**E. PENUTUP**

**1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari Basis Akuntansinya, dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 dengan hasil sebesar 438 dimana basis yang digunakan untuk tahun anggaran 2015 adalah basis kas.

2. Dilihat dari Karakteristik Kualitatifnya, dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 dengan hasil sebesar 1456 dimana karakteristik kualitatif yang digunakan sudah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami serta memenuhi kualitas yang dikehendaki.

3. Dilihat dari Prinsip-Prinsip Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto cukup sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 dengan hasil sebesar 450 dimana LRA sudah menggunakan basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

4. Dilihat dari Pengakuan dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 dengan hasil sebesar 730 dimana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

5. Dilihat dari Pengukuran Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 dengan hasil sebesar 441 dimana pengukuran pospos dalam LRA menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang diterima/dikeluarkan.

6. Dilihat dari Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 dengan hasil sebesar 638.

7. Dilihat secara keseluruhan Penerapan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2015 telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 dengan hasil nilai keseluruhan sebesar 4153.

**2. Saran**

Adapun yang menjadi saran penulis adalah :

Pada Tahun Anggaran berikutnya hendaknya Pemerintah harus berpedoman pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 atau peraturan-peraturan daerah yang mendukung.

Supaya LaporanKeuangan khususnya Laporan Realisasi Anggarannya handal, kompeten, berkualitas dan Penyajian LRA dilakukan secara transparan supaya mempermudah masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan sertamempermudah untuk mengetahui evaluasi kinerja Pemerintah dalam hal efisiensidan efektivitas anggaran.

**DAFTAR PUSTAKAh**

Arikunto, Suharsimi, *Posedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik***,** Edisi Revisi Keenam , Cetakan Ketigabelas : Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Erlangga, Yogyakarta.

Bastian, 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia.* Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Erlina dan Omar. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Selemba Empat, Jakarta, 2015.

Faradillah, Andi, 2013, Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Gultom, Yanti Theresa 2008, Penerapan PSAP No. 2 Tentang Laporan Realisasi  
Anggaran Pada Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Halim, Abdul, 2013, *Akuntansi Keuangan Daerah***,** Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta.

Hariadi, Restianto, Bawono, 2010, *Pengelolalaan keuangan daerah,* Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Hariyanto, 2012, *Penggunaan Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. STIE Dharma Putra , Semarang.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I, 2015, BPK RI. *http://www.bpk.go.id,* diakses pada tanggal 10 Maret 2016.

Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kurniawan M. Manangkalangi, 2013, Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang.

Mardalis, 2008, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan Kesepuluh, Bumi Aksara, Jakarta.

Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Pasal 5ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah.

Perturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

Purba, Elvis. dan Parultan Simanjuntak. 2011. *Metode Penelitian*, Edisi Kedua. Medan, Universitas HKBP Nommensen.

Republik Indonesia, 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Sugiyono, 2009, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.

Sudjana, 2005, *Metode Statistika***,** Edisi Keenam, Cetakan Pertama, Tarsito Bandung, Bandung.

Simanihuruk, M. H. 2013, Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.